

**PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN SOLOK**

TESIS

*Diajukan kepada Fakultas Hukum sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum*



Oleh:

MARLAINI

NIM. 2320113031

Pembimbing:

Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.

Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

**PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN SOLOK**

**Marlaini, 2320113031, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 180 Halaman, Tahun 2026**

ABSTRAK

Kebakaran lahan terjadi karena dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran lahan yang disebabkan oleh faktor alam adalah terjadinya petir tanpa disertai turunnya hujan, letusan gunung berapi atau batu bara yang terbakar. Kebakaran lahan yang disebabkan oleh manusia yaitu pembukaan lahan dengan cara membakar yang mana kebakaran tersebut tidak terkedali sehingga terjadinya kebakaran. Penanggulangan kebakaran lahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan dan mengatasi kebakaran lahan agar tidak meluas serta meminimalkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan dampak sosial. Penelitian ini menjelaskan tentang penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok, Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok, dan Kendala dalam penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris (*socio-legal research*), yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam Masyarakat. Penelitian ini meliputi beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-perundangan (*Statue Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Data penelitian ini yaitu data primer dengan menggunakan Teknik wawancara (*in depth interview*) dan data sekunder yang diperoleh dari *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Solok memiliki kerangka hukum yang memadai (UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH), implementasi di lapangan belum efektif karena adanya kesenjangan antara regulasi dan kapasitas operasional. Terdapat tiga hambatan utama: Keterbatasan Anggaran Mitigasi yang menghambat penyediaan solusi pertanian tanpa bakar secara massal, padahal ini merupakan kunci kepatuhan hukum preventif, keterbatasan Pengawasan dan Penegakan Hukum akibat luasnya area geografis, kekurangan personel APM/Satpol PP, dan sulitnya pembuktian unsur kesengajaan dan Persepsi masyarakat yang masih menganggap pembakaran lahan sebagai metode paling efisien, meskipun peran MPA sudah sangat strategis. Upaya penanggulangan kebakaran lahan di kabupaten solok menunjukan kondisi yang kompleks dan membutuhkan pendekatan terpadu. Peran masyarakat terutama melalui kelompok MPA sangat strategis sebagai garda terdepan pencegahan dan respon awal. Kendala dalam penanggulangan kebakaran lahan masih menghadapi hambatan yang kompleks. Dalam penelitian ini penulis menyarankan, upaya penanggulangan kebakaran lahan di kabupaten solok perlu didukung dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih konsisten pemberdayaan masyarakat melalui program masyarakat peduli api harus diperluas dengan edukasi berkelanjutan mengenai resiko pembakaran lahan, dampak lingkungan dan alternatif pertanian ramah lingkungan.

Kata Kunci: Kebakaran Lahan, Perlindungan Hukum Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan

LAND FIRE MITIGATION AS ENVIRONMENTAL LEGAL PROTECTION TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SOLOK REGENCY

Marlaini, 2320113031, Master of Law Program, Faculty of Law,
Universitas Andalas, 180 Pages, 2026

ABSTRACT

Land fires occur due to two factors, namely natural factors and human factors. Land fires caused by natural factors include lightning strikes unaccompanied by rainfall, volcanic eruptions, or burning coal seams. Land fires caused by human factors involve land clearing through uncontrolled burning, which subsequently develops into wildfire. Land fire mitigation refers to the efforts undertaken to prevent, control, and address land fires so that they do not spread further, while minimizing environmental damage, economic losses, and social impacts. This study examines land fire mitigation in the context of legal protection of the environment for realizing sustainable development in Solok Regency, community participation in land fire mitigation for the same purpose, and the constraints encountered in land fire mitigation efforts in Solok Regency. This research employs a juridical-empirical (socio-legal) research method, which examines and analyzes the functioning of law within society. The study applies several approaches, namely the statutory approach, the sociological approach, and the conceptual approach. This research is descriptive-analytical in nature. The data used consist of primary data obtained through in-depth interviews and secondary data obtained through library research. The results indicate that although Solok Regency possesses an adequate legal framework, namely Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, its implementation in the field remains ineffective due to a gap between regulation and operational capacity. Three main obstacles were identified. First, limited mitigation budgets hinder the large-scale provision of non-burning agricultural solutions, even though such solutions are key to preventive legal compliance. Second, supervision and law enforcement are constrained by the vast geographical area, insufficient numbers of law enforcement officers and Satpol PP (Civil Service Police Unit) personnel, and the difficulty of proving elements of intent. Third, public perception continues to regard land burning as the most efficient method of land clearing, despite the highly strategic role played by Fire Care Community groups (Masyarakat Peduli Api/MPA). Efforts to mitigate land fires in Solok Regency reflect a complex situation that requires an integrated approach. Community participation, particularly through MPA groups, is strategically vital as the frontline for prevention and initial response. Constraints in land fire mitigation continue to present complex challenges. This study recommends that land fire mitigation efforts in Solok Regency be supported by stronger regulation and more consistent law enforcement, and that community empowerment through the Fire Care Community program be expanded through continuous education on the risks of land burning, its environmental impacts, and environmentally friendly agricultural alternatives.

Keywords: Land Fire, Environmental Legal Protection, Sustainable Development.

